

Katalog : 4301003.3308

PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2017



PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG 2017

ISBN : 978-602-710-416-7

Katalog : 4301003.3308

No. Publikasi : 33080.1829

Ukuran Buku : 14,8 x 21,0 cm

Jumlah Halaman : viii + 56 Halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Magelang

Penyunting :

BPS Kabupaten Magelang

Gambar Kulit :

BPS Kabupaten Magelang

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak oleh :

TM Percetakan

KATA PENGANTAR

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Magelang, yang memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 ini mengulas data pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator-indikator pendidikan yang terukur sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan maupun bagi masyarakat luas.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran hingga terbitnya publikasi ini, diucapkan terimakasih. Diharapkan juga adanya kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan publikasi tahun berikutnya.

Kota Mungkid, Juli 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang



Ir. Sri Wiyadi, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Tujuan	5
1.3 Sistematika Penyajian	6
BAB 2 METODOLOGI.....	9
2.1 Sumber Data	9
2.2 Metode Pengumpulan Data	9
2.3 Metode Analisis	10
2.4 Konsep dan Definisi	10
BAB 3 PARTISIPASI PENDIDIKAN.....	23
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini	25
3.2 Partisipasi Sekolah	28
4.3 Angka Partisipasi Sekolah	31

4.4 Angka Partisipasi Kasar.....	34
4.5 Angka Partisipasi Murni.....	36
BAB 4 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	39
4.1 Angka Melek Huruf.....	40
4.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	42
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	44
BAB 5 SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	49
5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru.....	50
5.2 Rasio Murid Guru, Sekolah Murid dan Sekolah Guru.....	52
PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	26
Tabel 3.2	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	27
Tabel 3.3	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	29
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	30
Tabel 3.5	APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	32
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	45

Tabel 5.1	Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	51
Tabel 5.2	Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	53

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	35
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	36
Gambar 4.1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	41
Gambar 4.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	43

BAB 1

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, gender, dan lokasi geografis.

Pendidikan secara nasional berdasarkan Pancasila dengan tujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cita-cita leluhur agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat -- membangun diri sendiri maupun pembangunan bangsa, terutama pembangunan di Kabupaten Magelang.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses, dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Demikian juga UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5, ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat).

Dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium DevelopmentGoals (MDG's), sektor pendidikan telah disepakati bersama yang tertuang dalam tujuan kedua yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Adapun target yang ingin dicapai dalam MDG's sektor pendidikan tertuang dalam target ke-3 yaitu

memastikan pada tahun 2016 semua anak, di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Pada tanggal 25-27 September 2017 telah terjadi pertemuan akbar di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, yaitu *Sustainable Development Summit*, yang didalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's. MDG's sudah dijalankan sejak September 2000 dan berakhir pada tahun 2016.

Sustainable Development Goals (SDG's) memiliki 17 tujuan global (*Global Goals*). Tujuan di bidang pendidikan berada di tujuan nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Maksud dari pendidikan berkualitas tujuan SDG's yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Akses pendidikan yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan dalam lima tahun mendatang. Akses pendidikan menjadi isu besar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019. Komponen kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak dan

tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan aksesnya. Dalam lima tahun terakhir diketahui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah masih ketatnya kesenjangan antar wilayah dalam hal akses. Mulai dari persoalan perbedaan tingkat perkembangan daerah, hingga tingginya perbedaan kualitas pendidikan yang diakses.

Latar belakang dari penulisan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data pendidikan dengan mendeskripsikan angka-angka statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk membuat angka- angka tersebut menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh para pengguna data dan pada akhirnya dapat dipahami khususnya oleh para pengambil keputusan serta oleh masyarakat luas

1.2 Tujuan

Secara umum penulisan Publikasi Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan serta kondisi pendidikan yang telah dan sedang dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya agar lebih dipahami oleh para pemakai data serta ditindaklanjuti sebagai salah satu data yang dapat digunakan untuk perencanaan dalam rangka

menyongsong program pemerintah di bidang pendidikan menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Program Wajib Belajar (Wajar).

1.3. Sistematika Penyajian

Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 ini mengulas data pendidikan di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator-indikator pendidikan yang terukur. Pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pendidikan umum maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indikator ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan prasekolah (TK) penduduk usia 3-6 tahun dan pendidikan sekolah dasar umur 7-12 tahun serta paket A.
2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama usia 13-15 tahun baik umum maupun paket B dan menengah lanjutan 16-18 tahun baik umum atau kejuruan maupun paket C.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi dengan usia 19-24 tahun.

Data indikator pendidikan yang disajikan pada publikasi ini bersifat umum, sesuai dengan yang tercakup pada tabel hasil pengolahan yang bersumber dari Susenas.. Data yang disajikan meliputi partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan serta fasilitas sekolah.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

Sumber data utama dari penulisan Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenast) tahun 2016 dan 2017



BAB 2

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data utama dari penulisan Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2017 ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016 dan 2017. Sumber data yang lain adalah data sekunder dari instansi Kemendiknas yang membawahi sekolah negeri dan Kemenag yang membawahi sekolah swasta, yang meliputi jumlah guru, jumlah murid dan jumlah fasilitas sekolah.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden, melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

2.3. Metode Analisis

Gambaran umum tentang keadaan pendidikan masyarakat disajikan dengan metode analisis sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.4. Konsep Definisi

Konsep, definisi dan penjelasan teknis dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mempermudah memahami data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini.

2.4.1. Keterangan Pendidikan

Keterangan pendidikan yang dimaksud meliputi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf.

Jenjang pendidikan formal terdiri dari :

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

umum/kejuruan (Termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Paket A dan Paket B.

2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas), serta Paket C.
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
 - a. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
 - b. Program non-gelar adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II),

pendidikan diploma III (D.III) , pendidikan diploma IV (D.IV),
pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2.

2.4.2 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) yang berada dibawah pengawasan Kemendiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta;

Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan masih bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan masih bersekolah.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, maupun non formal (Paket A,B,C) tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan: Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat/kejuruan adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama};

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA);

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

Program D.I/II adalah program D.I/II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda

Program D.IV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.
2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

2.4.3 STTB tertinggi yang dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/Sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau Paket A1)

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

Paket A adalah tamat mengikuti ujian Paket A yang diselenggarakan oleh kemendiknas

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kemandirian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

Paket B adalah tamat mengikuti ujian Paket B yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;

SMA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat dengan Sekolah Menengah Atas; **Paket C** adalah tamat mengikuti ujian Paket C yang diselenggarakan oleh Kemendiknas;

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

Diploma III/Sarjana Muda adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

2.4.4 Angka Melek huruf

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misal huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Tidak dapat membaca dan menulis, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di mana AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan. AMH adalah proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)

Tingkat Partisipasi Sekolah merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

- ☐ Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 7-12 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
- ☐ Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 13-15 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.
- ☐ Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun merupakan salah satu ukuran untuk menentukan seberapa banyak penduduk usia 16-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- APK SLTP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- APK SMU/K merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

- APM SD merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- APM SMP merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SLTP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.

- APM SMA merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB 3

PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.



BAB 3

PARTISIPASI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya anak-anak namun semua orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All (EFA), sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, ayat 3

menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2017 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas)

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No	Kegiatan	Umur 0-2		Umur 3-4		Umur 5-6	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Masih/pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini	.9%	.4%	31.1%	22.5%	65.0%	69.5%
2	Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran sebelum tahun ajaran ini	.0%	.0%	4.7%	2.6%	28.3%	21.0%
4	Tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah	99.1%	99.6%	64.2%	75.0%	6.6%	9.5%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Dari tabel 3.1 terlihat pada kelompok umur 0-2 tahun pada tahun 2016 tercatat sebanyak 0,9 persen anak usia 0-2 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah tahun ajaran yang bersesuaian pada tahun 2016 sebesar 0,9 persen mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,4 persen. Pada kelompok umur 3-4 tahun anak yang sedang dan pernah mengikuti pendidikan pra sekolah mengalami penurunan yang cukup besar, dari 35,8 persen pada tahun 2016 menjadi 25,1 persen pada tahun 2017. Penurunan partisipasi sekolah pada kelompok umur 3-4 tahun diimbangi dengan kenaikan partisipasi sekolah kelompok umur 5-6 tahun, dari tabel 3.1 terlihat bahwa kelompok umur 5-6 tahun anak yang masih/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah

pada tahun ajaran yang bersesuaian pada tahun 2016 sebesar 65 persen dan mengalami kenaikan menjadi 69,5 persen pada tahun 2017.

Tabel 3.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Magelang, 2016-2017

Jenis Pendidikan Pra Sekolah	2016	2017
1	2	3
TK/RA/BA	64.05	82.00
Kelompok bermain	12.25	0.9
Taman Penitipan Anak	22.68	0.7
Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu	1.02	16.4

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Tabel 3.2 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan PAUD yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak yaitu sebesar 64,05 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 82,00 persen pada tahun 2017, kemudian diikuti Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu sebesar 1,02 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 16,4 persen pada tahun 2017. Dari Tabel 3.2 terlihat untuk jenis pendidikan Kelompok Bermain pada tahun 2017 apabila dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar dimana pada tahun 2016 sebesar 12,25 persen menjadi 0,9 persen pada tahun 2017, demikian juga untuk jenis pendidikan taman pendidikan

anak dari sebesar 22,68 pada tahun 2016 menjadi 0,7 pada tahun 2017. Penurunan persentase anak umur 0-6 yang sekolah di taman penitipan anak dan kelompok bermain diimbangi dengan naiknya anak umur 0-6 tahun yang sekolah di pos PAUD/PAUD terintegrasi posyandu.

3.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan factor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan system pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Tahun	Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
1	2	3	4	5	6
2016	Laki-laki	5,25	22,54	72,21	100
	Perempuan	6,00	22,12	71,88	100
	Laki-Laki+Perempuan	5,62	22,33	72,05	100
2017	Laki-laki	4,64	23,01	72,35	100
	Perempuan	9,24	21,46	69,30	100
	Laki-Laki+Perempuan	6,94	22,23	70,83	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2016 sebesar 5,62 persen dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 6,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas sebesar 6,94 persen yang belum/ tidak menikmati pendidikan.

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2017 persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah untuk perempuan sebesar 9,24 persen lebih tinggi daripada penduduk laki-laki yang sebesar 4,64 persen. Pola yang sama untuk tahun 2016 dimana penduduk umur 5 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan lebih banyak persentasenya yang tidak/belum pernah bersekolah dibandingkan penduduk 5 tahun keatas berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Tahun	Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total
1	2	3	4	5	6
2016	Umur 7-12	1,82	98,18	0	100
	Umur 13-15	0,90	95,65	3,45	100
	Umur 16-18	0,81	67,24	31,95	100
	Umur 19-24	0,16	18,00	81,84	100
2017	Umur 7-12	1,06	98,94	0	100
	Umur 13-15	0	96,45	3,55	100
	Umur 16-18	0	70,36	29,64	100
	Umur 19-24	0,59	17,03	82,38	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada Tabel 3.3 terlihat

bahwa persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) pada tahun 2017 sebesar 98,94 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 96,45 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 70,36 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 17,03 persen. Untuk tahun 2016 polanya cenderung sama dengan tahun 2017 dimana semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya.

Tabel 3.4 juga menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pada tahun 2016 sebanyak 1,82 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yang sebesar 1,06 persen.

3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau angka partisipasi sekolah (APS).

APS merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Secara statistik APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pdtk yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

Tabel 3.5 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Tahun	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
1	2	3	3	4
2016	Umur 7-12	96,88	99,56	98,18
	Umur 13-15	96,28	94,96	95,65
	Umur 16-18	68,44	65,93	67,24
2017	Umur 7-12	98,97	98,90	98,94
	Umur 13-15	96,61	96,26	96,45
	Umur 16-18	72,39	68,21	70,36

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Berdasarkan data Susenas 2016-2017, secara umum, APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun relatif tinggi, lebih dari 95

persen. Pada Tahun 2017 APS pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,94 persen meningkat sebesar 0,8 persen jika dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 98,18, sedangkan APS kelompok umur 13-15 pada tahun 2017 sebesar 98,45 yang mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dibandingkan tahun 2016. Tingginya APS pada kedua kelompok umur, 7-12 tahun dan 13-15, dalam bersekolah bisa jadi sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir.

Seiring dengan pencapaian tersebut, APS untuk kelompok umur 16-18 tahun juga mengalami peningkatan yang cukup besar, pada tahun 2016 sebesar 67,24 meningkat menjadi 70,36 dibandingkan tahun 2016 . Walaupun belum sebesar APS 7-15 tahun, namun hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, sampai dengan pendidikan menengah ke atas semakin dapat dinikmati dan dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam

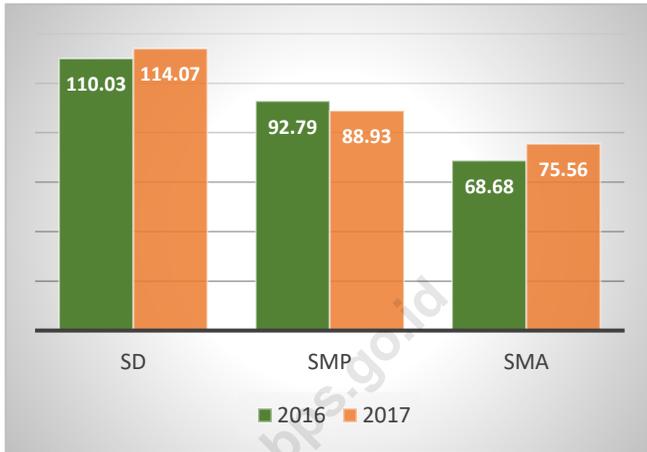
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua maupun umur muda dibanding umur standar di jenjang pendidikan tersebut. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

**Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar
Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017**



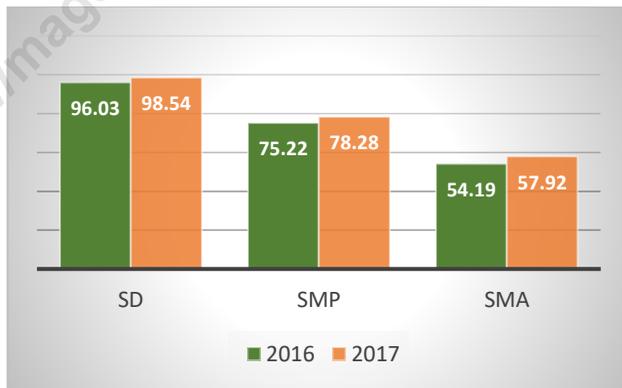
Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Berdasarkan gambar 3.2 dalam kurun waktu 2016-2017, angka partisipasi kasar Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan di jenjang pendidikan SD dan SMA, sedangkan jenjang pendidikan untuk sekolah menengah pertama (SMP) mengalami penurunan yang cukup signifikan. APK SD/MI tahun 2016 sebesar 110,03 persen meningkat ditahun 2017 menjadi 114,07 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, APK sebesar 92,79 persen ditahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 88,93 persen ditahun 2017. Untuk APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan sebesar 68,68 persen ditahun 2016 menjadi 75,56 persen ditahun 2017.

3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. Pengukuran APM bertujuan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM 100, berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu seluruhnya sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur (bersekolah tepat waktu).

**Gambar 3.2. Angka Partisipasi Murni
Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017**



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Dalam kurun waktu 2016-2017 APM di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI meningkat dari 96,03 persen di tahun 2016 menjadi 98,54 persen ditahun 2017. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 75,22 persen menjadi 78,28 persen. Pada tingkat SMU/MA, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan dari 54,19 persen ditahun 2016 menjadi 57,92 persen ditahun 2017.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB 4

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.



BAB 4

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sector pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bias tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indicator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

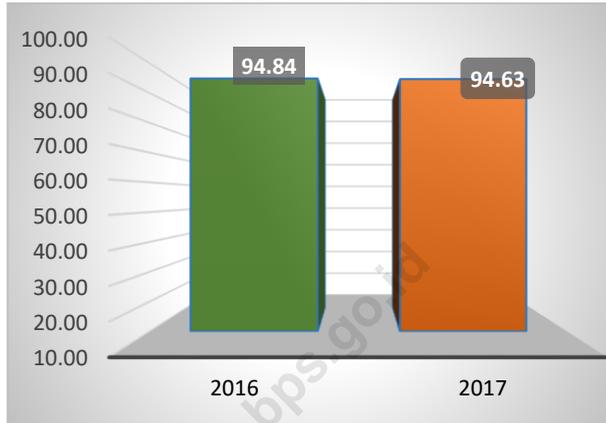
4.1 Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya.

Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variable dalam menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

Gambar 4.1.
Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Gambar 4.1 yang menyajikan angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas. Dari gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 94,84 pada tahun 2016, dan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen menjadi 94,63 persen pada tahun 2017.

4.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Rata-rata lama sekolah (*mean yearsof schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun. Perhitungan

lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Gambar 4.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017



Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Pada kurun waktu 2016 hingga 2017, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2016 sebesar 12,15 meningkat sebesar 0,32 persen menjadi 12,47 pada tahun 2017. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Di tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah mencapai 12,47, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sejalan dengan pencapaian angka Harapan Lama Sekolah, pertumbuhan positif juga dicapai oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 7,40 meningkat menjadi 7,41 pada tahun 2017. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,41 persen pada 2017, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II. Hal ini bisa diharapkan sebagai modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik.

4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke atas dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	2016			2017		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/MI	16,34	21,02	18,69	22,68	26,17	24,38
SD/MI	38,86	41,51	40,19	34,27	35,77	35,00
SMP/MTs	10,40	14,61	12,51	22,94	19,99	21,50
SMA/SMK/MA	28,76	16,44	22,57	16,67	13,37	15,06
Perguruan tinggi	5,65	6,43	6,04	3,44	4,70	4,05

Sumber: BPS Kabupaten Magelang (Susenas 2016-2017)

Tabel 4.2 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas. Menarik untuk dicermati, bahwa tren penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SMP/MTs mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 12,51 persen pada tahun 2016 menjadi 21,50 persen pada tahun 2017. Akan tetapi Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa pada tahun 2017 peningkatan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan pendidikan yang ditamatkan setingkat SMP/MTs tersebut belum diimbangi dengan meningkatnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga SMA/ sederajat ke atas.

Pada Tahun 2017 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan hingga jenjang SMA/ sederajat sebesar 15,06 persen, menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 22,57 persen. Sementara itu, pada tahun 2017 untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan hingga jenjang perguruan tinggi jika dilihat pada Tabel 4.2 sebesar 6,04 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,05.

Untuk persentase penduduk umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang kurang dari SMA sederajat (tidak/belum

pernah sekolah, belum tamat SD/MI, ijazah SD/MI dan SMP/MTs) pada tahun 2016 sebesar 71,39 dan pada tahun 2017 angkanya lebih tinggi yaitu sebesar 80,89 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Tercatat pada 2017, persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas sebesar 20,11 persen lebih tinggi dari persentase penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA sederajat ke atas yang hanya 18,07 persen.

BAB 5

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).



BAB 5

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain jumlah fasilitas pendidikan, jumlah tenaga guru, rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid guru. Jumlah sekolah, guru dan murid yang dicakup di sini adalah sekolah jenjang pendidikan

SD,SMP,SMA baik negeri maupun swasta yang berada dibawah Kemendiknas dan Kemenag dan data yang digunakan bersumber dari kedua instansi tersebut.

5.1 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Guru

Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan hendaknya diiringi dengan meningkatnya fasilitas pendidikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ketersediaan sekolah, terutama mengenai daya tampung ruang kelas sehingga program peningkatan kualitas manusia di bidang pendidikan dapat berjalan lancar. Di samping itu, kualitas dan kuantitas guru juga berperan dalam hal membangun kualitas pendidikan.

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran

**Tabel 5.1 Jumlah Sekolah, Murid, Guru
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017**

Pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru
1	2	3	4	5
SD/MI	2016	916	123.515	8.900
	2017	915	123.354	8.693
SMP/MTs	2016	215	52.573	4.154
	2017	215	52.998	4.073
SMA/SMK/MA	2016	97	33.651	2.715
	2017	98	36.215	2.687

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pada tahun 2017, jumlah sekolah SD/MI (negeri dan swasta) sebanyak 915 sekolah dengan murid sebanyak 123.354 siswa dan guru sebanyak 8.693 orang, jumlah sekolah SMP/MTs (negeri dan swasta) sebanyak 215 sekolah dengan murid sebanyak 52.573 dan guru sebanyak 4.154, dan jumlah sekolah SMA/K (negeri/swasta) sebanyak 98 sekolah dengan murid sebanyak 36.215 murid dan guru sebanyak 2.687 guru. Pada tahun 2017 jumlah sekolah SMA mengalami peningkatan dari tahun 2016, sedangkan jumlah sekolah SD dan SMP tetap tidak mengalami perubahan.

5.2 Rasio Sekolah Guru, Sekolah Murid, dan Guru Murid

Indikator jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid tentu saja tidak cukup mempunyai arti jika hanya berupa penjumlahan. Pada gambar 5.1 berikut akan ditampilkan rasio guru-murid, rasio sekolah-murid dan rasio sekolah-guru.

Rasio guru-murid adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Rasio sekolah-murid adalah Rasio murid per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah.. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya.

Rasio sekolah-guru adalah Rasio Tenga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

Tabel 5.2 Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Pendidikan	Tahun	S/G	S/M	G/M
1	2	3	4	5
SD/MI	2016	1:10	1:135	1:14
	2017	1:10	1:135	1:14
SMP/MTs	2016	1:19	1:245	1:13
	2017	1:20	1:247	1:13
SMA/SMK/MA	2016	1:28	1:347	1:12
	2017	1:27	1:370	1:12

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Keretangan: S/G= Rasio Sekolah-Guru

S/M= Rasio Sekolah Murid

G/M= Rasio Guru Murid

Selama 2 tahun terakhir, rasio guru murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA relatif stabil, pada tahun 2017, rasio SD/MI adalah 14, artinya setiap 1 orang guru mengampu 14 murid SD/MI. Rasio SMP/MTs sebesar 13, artinya setiap 1 orang guru

mengampu 13 murid, dan rasio SMA/SMK/MA sebesar 12, artinya 1 orang guru mengampu 12 murid. Keadaan di atas menunjukkan bahwa seorang guru di tingkat SD melayani siswa lebih banyak dibanding dengan guru yang bertugas di SMP atau di SMA.

Dari Tabel 5.2 terlihat, pada tahun 2017 rata-rata setiap sekolah terdapat 10 guru pada jenjang sekolah SD/ sederajat, 20 guru pada jenjang sekolah SMP/ sederajat dan 27 guru pada jenjang pendidikan sekolah SMA/ sederajat. Rasio sekolah guru apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk jenjang SMP dan SMA mengalami perubahan sedangkan untuk jenjang SMP tetap.

Untuk rasio sekolah murid pada tahun 2017 setiap sekolah rata-rata menampung sebanyak 135 murid pada jenjang SD/ sederajat, 247 murid pada jenjang SMP/ sederajat, dan 370 murid pada jenjang SMA/ sederajat. Besarnya rata-rata murid tiap sekolah pada tahun 2017 setiap jenjang pendidikan apabila dibandingkan tahun 2016 untuk jenjang SD/ sederajat stabil, untuk jenjang SMP/ sederajat dan mengalami dan jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan .

PENUTUP



Nilai APS di Kabupaten Magelang tahun 2017
Kelompok umur 7-12 sebesar 98,94
Kelompok umur 13-15 sebesar 96,45



PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang Profil Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2017 yang telah disajikan, maka dapat dirangkum beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan masa keemasan anak (*the gold age*), Partisipasi PAUD untuk anak umur 5-6 tahun di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 80,00 persen.
2. Nilai APS di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 untuk kelompok umur 7-12 sebesar 98,94 dan APS untuk Kelompok umur 13-15 sebesar 96,45. Tingginya APS pada kedua kelompok umur tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun.
3. Terdapat 59,38 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya tamat SD ke bawah. Ini menunjukkan bahwa hampir separo lebih penduduk Kabupaten Magelang masih berpendidikan rendah.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511, Telp (62-293) 788143
Website : <http://magelangkab.bps.go.id> E-Mail : bps3308@bps.go.id

